BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 pasal 1, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1954), yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Koperasi berperan membangun tatanan perekonomian nasional, maka diharapkan pihak koperasi harus dapat menciptakan kebijakan dan tata cara pemberian kredit yang baik. Kebijakan pemberian kredit berjalan baik dengan adanya kerjasama yang erat dari semua anggota dengan fungsinya masing-masing. Kebijakan pemberian kredit yang diterapkan akan semakin efektif apabila dalam koperasi terdapat pengendalian internal yang baik. Untuk mendukung berjalannya pemberian kredit yang sehat, koperasi harus melakukan pengawasan serta pembinaan selama proses pemberian kredit berlangsung. Pemberian kredit yang sehat dilakukan untuk mencegah adanya

risiko kredit yang telah mengalami kemacetan. Pengendalian internal diperlukan sebagai dasar kegiatan operasional koperasi yang sehat dan aman dalam manajemen koperasi.

Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi yang beranggotakan pegawai di sebuah departemen/kantor/instansi pemerintah. Koperasi Pegawai Negeri juga harus dikelola dengan manajemen yang tepat, pengurus dan pelaksana yang berkemauan untuk memajukan koperasi. Selain itu juga perlu tenaga yang terampil, semuanya jujur dan mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang perkoperasian maupun pengetahuan lain sesuai bidangnya. Khusus untuk koperasi pegawai ada dukungan dari pimpinan, serta mendapat fasilitas dari dinas seperti ruang kerja, ruang usaha dengan seluruh fasilitasnya, peralatan dan pegawai yang diperbantukan, serta ijin pegawai untuk duduk sebagai pengurus.

Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti adalah koperasi yang didirikan untuk anggota yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng yang meliputi Sekretariat Daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, 9 Kecamatan se-Kabupaten Buleleng serta anggotanya juga berasal dari pegawai Honor Daerah dengan pengangkatan honor daerah berdasarkan surat keputusan Bupati Buleleng. Perkumpulan koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti dengan nama singkatan KPN Praja Mukti dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar koperasi No.262/BH/PAD/KWK.22/III/96 disebut koperasi. Koperasi berkedudukan di jalan pahlawan nomor 1 Singaraja. Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti merupakan koperasi khusus Pegawai Negeri Sipil milik pemerintah daerah dimana koperasi ini memiliki tujuan yang sama dengan koperas-koperasi lainnya yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan operasionalnya seperti pelayanan simpan pnyam, pertokoan, jasa pembayaran listrik dan telepon, pelayanan foto copy, dan usaha lainnya. Koperasi ini didirikan sejak tahun 1976 atas perintah Bapak Bupati Buleleng pada saat itu (Bapak Hartawan Mataram) dengan modal awal diambil dari dana kesejahteraan pegawai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menurut UU Perkoperasian No.17 tahun 2012 pada BAB VII pasal 66, mengatur tentang modal yang didalamnya berisi:

- (1) Modal koperasi terdiri dari: setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.
- (2) Selain modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Modal koperasi dapat berasal dari:
 - a. Hibah.
 - b. Modal penyertaan.
 - c. Modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggota
 2. Koperasi lainnya dan /atau anggotanya
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; dan/atau
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan /atau ketentuan perundang-undangan.

Pada umumnya, sumber modal koperasi, terdiri dari:

1. Modal sendiri, yaitu berasal dari simpanan pokok, cadangan, atau donasi yang merupakan hasil himpunan dana dari warga secara sukarela maupun wajib demi memajukan kesejahteraan bersama, terutama bagi warga lain yang lebih kekurangan.
2. Modal pinjaman, yang berasal dari pinjaman kepada anggota koperasi lain, bank, atau penerbitan surat hutang.

Dari pemaparan tersebut, Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti juga memiliki sumber modal baik dari modal sendiri dan modal pinjaman dari pihak external. Berikut adalah pemaparan-pemaparan lebih lanjut mengenai permodalan dari Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti.

Pada umumnya, untuk memperoleh bantuan dana hibah atau pinjaman dari pihak external, instansi harus mengajukan proposal yang berisikan laporan keuangan instansi yang bersangkutan untuk dapat memperoleh dana yang telah dicanangkan. Dalam mengajukan permohonan bantuan dana, memiliki berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh

pemohon. Setelah itu, pihak calon pemberi dana akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan dana untuk mengetahui apakah pihak pemohon berhak atau tidak mendapatkan bantuan dana tersebut. Jika berhak maka permohonan akan disetujui. Selanjutnya, pihak pemohon hanya perlu menunggu hingga pencairan dana dilakukan oleh pihak pemberi dana dan diberikan kepada pihak pemohon bantuan dana tersebut.

Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti memiliki bantuan dana hibah sebesar Rp 550.000.000,-. Namun, Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti tidak melalui prosedur seperti diatas untuk bisa memperoleh bantuan dana hibah tersebut. Bantuan dana hibah yang diperoleh oleh Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng namun dalam jangka waktu yang tidak menentu. Untuk saat ini, pihak Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti juga tidak melakukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah Kabupaten Buleleng, pihak perbankan, maupun pihak external lainnya dikarenakan modal yang telah dimiliki Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti sudah cukup besar dan cukup memadai untuk membiayai kegiatan operasional Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti.

Salah satu kegiatan utama dan merupakan sumber pendapatan bagi Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti, dengan memberikan jasa pinjaman kredit. Dengan memberikan pinjaman kredit koperasi pegawai negeri tentu tidak ada masalah dalam pelunasan kredit karena telah melalui pemotongan gaji. Tetapi berdasarkan laporan tahun buku pada Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti, tahun buku 2018-2020. Ditemukan adanya tunggakan kredit dengan rincian sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Daftar Kredit Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun Buku		
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Anggota 1	19.444.444	19.444.444	19.444.444
Anggota 2	49.034.375	49.034.375	49.034.375
Anggota 3	60.396.373	60.396.373	60.396.373
Anggota 4	70.000.000	70.000.000	70.000.000
Anggota 5	28.125.000	28.125.000	28.125.000

Anggota 6	47.916.500	47.916.500	47.916.500
Anggota 7	45.895.000	45.895.000	45.895.000
Anggota 8	6.666.700	6.666.700	6.666.700
Anggota 9	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Anggota 10	6.783.333	6.783.333	6.783.333
Anggota 11	43.833.333	43.833.333	43.833.333
Anggota 12	-	10.000.000	10.000.000
Anggota 13	-	97.545.458	97.545.458
Anggota 14	-	64.974.300	64.974.300
Anggota 15	-	85.049.496	85.049.496
Anggota 16	-	100.000.000	100.000.000
Anggota 17	-	100.000.000	100.000.000
Anggota 18	-	91.831.126	91.831.126
Anggota 19	-	53.829.125	53.829.125
Anggota 20	-	8.319.902	8.319.902
Anggota 21	-	31.250.000	31.250.000
Total :	391.095.058	1.033.894.465	1.033.894.465

(Sumber: Laporan tahun buku 2018, 2019, 2020)

Pada tabel di atas penulis tidak diperkenankan untuk mempublikasikan nama dikarenakan akan mengganggu privasi dari si peminjam dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak manajer Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti untuk tidak mempublikasikan nama peminjam. Tahun buku 2018-2020 pada tabel tersebut menunjukkan bahwa: untuk anggota 1 sampai dengan anggota 21 terdapat kredit macet. Menurut Andrianto (2020:27) kredit yang dikategorikan macet, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga dalam waktu lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo. Berdasarkan hasil interview dengan pengurus koperasi (manajer) membuktikan bahwa “Memang benar terdapat kredit macet dari tahun 2018-2020 pada Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti”.

Non Performing Loan (NPL) adalah jumlah tunggakan kredit debitur pada bank selama periode tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Jumlah kredit yang tertunggak dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan merupakan rasio NPL dalam kurun waktu tertentu. Jika dilihat dari segi NPL

nya, maka dari data tahun buku 2018-2020 dapat dihitung rasio NPL = [Kredit macet / Total kredit disalurkan] x 100%. Dari data tersebut dapat dihitung rasio NPL sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, $NPL = [391.095.058 / 5.535.985.965] \times 100\% = 0,07\%$
2. Pada tahun 2019, $NPL = [1.033.894.465 / 7.100.500.000] \times 100\% = 0,14\%$
3. Pada tahun 2020, $NPL = [1.033.894.465 / 5.684.000.000] \times 100\% = 0,18\%$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018-2020 terdapat kenaikan persentase NPL. Memiliki arti bahwa terdapat indikasi adanya masalah dalam koperasi tersebut yang mana jika tidak mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada koperasi. Tetapi jika diukur dengan kategorinya koperasi tersebut memiliki NPL kategori sehat, Bank Indonesia menetapkan bahwa apabila bank masuk dalam kategori sehat maka rasio Non Performing Loan (NPL) harus dibawah 5%.

Jika dilihat dengan teori pemberian kredit tentang penilaian kualitas kredit maka hal ini tidak sesuai. Karena sebelum fasilitas kredit diberikan, koperasi harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan, untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pinjaman, maka dapat dilakukan dengan analisis 5C. Analisis 5C adalah salah satu metode yang umum digunakan lembaga keuangan seperti bank dan multifinance dalam analisa kelayakan permohonan kredit yang masuk. Penilaian dengan analisis 5C diuraikan sebagai berikut:

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit dan benar-benar harus dapat dipercaya. Pemberian kredit didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak bank maupun lembaga keuangan non bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, peminjam mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai

manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter ini merupakan faktor dominan sebab walaupun calon debitur tersebut mempunyai itikad baik untuk mampu dan menyelesaikan utangnya, namun jika tidak memiliki itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi lembaga keuangan maupun lembaga keuangan non bank di kemudian hari.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian dapat terlihat kemampuan nasabah/kreditur dalam mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalaman naya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Dengan semakin tinggi pendidikan dan pengalaman yang dimiliki calon debitur, maka pengelolaan kredit diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Dalam artian, bahwa calon nasabah tersebut akan menggunakan dana kredit tersebut sesuai dengan tujuan dan penggunaan.

c. *Capital*

Capital digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lain nya. Semakin besar modal dalam perusahaan, tentu akan semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank atau lembaga keuangan non bank akan merasa lebih yakin dalam memberian kredit. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat kredit bank atau lembaga keuangan non bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

d. *Condition*

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang,

penilaian kondisis atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Karena dengan hal tersebut, tentu akan mengamankan pemberian kredit jikalau terjadi kegagalan pembayaran dari nasabah akibat menurunnya omset usaha ataupun karena hal ini.

Penilaian prinsip 5C ini dijadikan tolak ukur dalam mencegah terjadinya pinjaman bermasalah dan menjadi pedoman dalam menentukan keputusan pemberian pinjaman atau kredit terkait layak atau tidaknya diberikan pinjaman.

Hal ini juga di dukung dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit. Wasito, Khusnul Khotimah, Septarina (2017) Semakin banyak kredit yang dikeluarkan oleh koperasi, menuntut koperasi untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internalnya. Kredit merupakan pinjaman yang dikeluarkan kepada anggota dan mengakibatkan piutang koperasi menjadi meningkat, peningkatan ini yang dapat memberikan celah terjadinya risiko seperti *human error* dan kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan guna menilai bahwa semua fungsi yang terkait dengan kredit telah berjalan secara efektif.

Lendi Irlandani Duha (2018) Kredit bermasalah ini biasanya disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankan oleh peminjam (anggota), kurangnya itikad baik peminjam (anggota) membayar angsuran kredit dan yang paling mendasar adalah lemahnya pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit.

Risky Priandini (2018) Semakin besar kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka tidak menutup kemungkinan adanya pinjaman kredit yang bermasalah. Tingkat kredit macet tidak semakin menurun melainkan sangat

bertambah karena kurangnya pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh petugas kredit macet.

Jauharatul Maknun (2019) Persaingan dalam lembaga keuangan sangatlah ketat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar Lembaga Keuangan Bank, akan tetapi persaingan terjadi antara Lembaga Keuangan Lainnya misalnya Koperasi Simpan Pinjam, Penggadaian dan Leasing. Persaingan yang cukup ketat itu mengharuskan setiap lembaga keuangan tersebut harus berlomba dalam persaingan bisnis. Didalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari adanya peran lembaga keuangan salah satunya adalah koperasi, selaku pemberi layanan bagi masyarakat.

Adinda Putri Asnawing (2019) Terselenggranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang penkreditan Koperasi, menunjukkan sikap kehati-hatian dalam sebuah koperasi tersebut. Agar mampu berperan sebagai badan usaha yang mandiri, koperasi dengan usaha pemberian kredit harus mengurangi resiko. Jika diteliti, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal Bagi sebuah Koperasi, realisasi kredit ialah sumber keuntungan terbesar dari bagi Koperasi yang berasal dari bunga kredit. Dalam koperasi, Laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Namun demikian, jika adanya pengendalian internal yang efektif dalam suatu lembaga akan berpengaruh kepada pendapatan atau SHU Koperasi, begitupula sebaliknya.

Maidani, Milda Handayani, Cahyadi Husadha (2020) Maraknya praktik-praktik yang menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku, tentunya diawali dari rendahnya pengendalian internal yang ada dalam sebuah badan usaha koperasi dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam.

Penulis tertarik melakukan penelitian terkait pengendalian internal pemberian kredit karena pemberian fasilitas kredit di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti, menghadapi permasalahan yaitu resiko kredit dimana kredit yang telah disalurkan tidak kembali sesuai dengan yang dipinjamkan. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal dibutuhkan metode pengendalian COSO meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sehingga penulis mengambil judul penelitian “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah diartikan sebagai suatu situasi dimana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan terjadi, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti masih terdapat adanya kredit macet hal ini tidak seharusnya terjadi dikarenakan sudah melalui pemotongan gaji. Untuk itu perlu adanya analisa pengendalian internal terhadap pemberian kredit untuk mengurangi adanya kredit bermasalah.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan pembatasan ruang lingkup masalah, sebagai akibat keterbatasan yang dimiliki peneliti, dimana dapat saja masalah-masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua, sehingga perlu ditetapkan batasan dalam suatu penelitian, agar penelitian memiliki fokus (tidak melebar) pada suatu kondisi tertentu. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada pemberian kredit dengan analisis pengendalian internal menurut COSO pada Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah dan akan dicarikan jawabannya melalui

pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti?.
2. Bagaimanakah sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti?.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti.
2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemberian kredit yang diterapkan di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal pada lingkup perkoperasian.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana (S1).
- b. Untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan melalui penelitian yang dilakukan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti untuk memberikan informasi agar bisa digunakan dalam proses evaluasi dan proses pengambilan keputusan terhadap pemberian kredit kedepannya.